

# Harmonisasi dan Sinergi Jabar- DKI

podium

Oleh **HARLIANTARA**  
Fasilitator Komunikasi  
Encourage Training Centre  
Bandung, Kaprodi Magister  
Ilmu Komunikasi Unistomo



**G**UBERNUR dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno telah dilantik Presiden Joko Widodo. Duet pemimpin ibu kota yang baru itu perlu membangun komunikasi untuk ciptakan harmonisasi dan sinergi dengan Provinsi Jawa Barat. Sebagai daerah pendukung utama ibu kota.

Sepanjang lintasan sejarah hubungan kedua daerah sangat erat dan saling membutuhkan. Seluruh aspek kehidupan dan kondisi lingkungan di Jawa Barat atau sebaliknya di ibu kota, sangat berpengaruh langsung terhadap keduanya.

Ibu kota perlu kepemimpinan yang komunikatif dan inovatif hadapi masalah lingkungan hidup. Kata kunci dan solusinya adalah membina hubungan baik dengan provinsi tetangga dekatnya. Lalu membuat program atau proyek bersama secara komprehensif.

Misalnya terkait dengan masalah bencana banjir di ibu kota perlu sinergi dan kerja sama yang konkret. Kerja sama jangan sebatas rapat-rapat koordinasi dan rencana tambal sulam. Koordinasi antara pemerintah pusat, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten jangan sebatas wacana dalam pembenahan daerah hulu sungai. Mestinya tebar wacana segera dihentikan, diganti dengan tebar solusi jangka pendek dan menengah.

Strategi penanggulangan banjir di ibu kota dengan pembenahan hulu DAS (Daerah Aliran Sungai) Ciliwung dan Cisadane sebenarnya bukan merupakan hal baru. Beberapa tahun yang lalu program itu sudah mengemuka tetapi eksekusinya masih lemah dan hanya bersifat parsial. Masalah itu diributkan kembali setelah bencana menerjang. Fakta menunjukkan bahwa koordinasi lintas provinsi terkait hal di atas belum efektif dan kurang berhasil atasi persoalan secara tuntas.

Untuk mengatasi problem banjir di ibu kota beserta deriva-

tifnya perlu menerapkan pranata harmonisasi dan sinergi Jabar-DKI. Sinergi Jabar-DKI merupakan bentuk atau pranata yang lebih setara untuk menyempurnakan konsep yang pernah ada, yakni konsep Megapolitan Jabodetabekjur.

Sinergi Jabar-DKI merupakan solusi untuk atasi membengkaknya sebuah kota. Sinergi sebaiknya disempurnakan lebih lanjut oleh DPR RI dalam tempo yang singkat tanpa hiruk pikuk politik yang menyebarkan rakyat. Di masa lalu konsep megapolitan yang terlahir dari kajian ilmiah dari para akademisi yang kredibel ditentang habis-habisan oleh elite politik tanpa argumentasi yang kuat. Dilain pihak rakyat luas hanya menjadi penonton dan pendengar setia.

Ada dua hal yang signifikan dalam pranata sinergi Jabar-DKI, yakni pentingnya melakukan moratorium produk tata ruang dan perlu dilakukan referendum bagi masyarakat terkait program bersama sebagai bentuk partisipasi aktif. Pranata sinergi Jabar-DKI itu hendaknya jangan semata-mata dengan cara-cara pasif yakni lewat revisi Undang-Undang No 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Modal yang amat penting dalam pembentukan pranata sinergi Jabar-DKI adalah partisipasi rakyat luas. Hendaknya rakyat di daerah perbatasan atau di Bogor, Depok, Bekasi dan Cianjur diberi kesempatan untuk mewarnai bentuk sinergi.

Pada prinsipnya esensi sinergi Jabar-DKI adalah menuju persatuan kota.

Jadi bukan caplok mencaplok wilayah. Untuk menuju persatuan kota perlu ditempuh moratorium terhadap semua produk tata-ruang sehingga ada momentum untuk mengulang secara lebih partisipatif.

Hal itu sangat penting untuk menggalang kesepakatan baru yang lebih bebas konflik serta akan lebih cepat dan adaptif dalam mengatasi problema banjir dan pengelolaan sampah. Perlu digaris bawahi bahwa tata-ruang adalah alat yang sangat jitu untuk merumuskan *new deal* secara lebih konkret dan komprehensif hingga menjangkau tahapan jangka panjang. Moratorium di atas secara otomatis juga akan merevisi RTRW Jakarta 2010 yang terkesan kurang aspiratif.

Tak bisa dimungkiri bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta yang ada selama ini dibuat minus kehendak kolektif dan kurang menyerap aspirasi publik yang representatif. Sehingga persoalan aktual seperti pengendalian banjir; penanggulangan pencemaran lingkungan, prasarana dasar, angkutan umum, belum mendapatkan dasar-dasarnya yang bermutu dan kokoh.

Sehingga bagian-bagian kota, ruang-ruang publik makin mengalami proses ruralisasi, bukannya urbanisasi, baik dalam arti arsitektur maupun perilaku sosial masyarakatnya. Secara politik dan sosial budaya pranata sinergi Jabar-DKI bisa dikatakan sebagai persatuan kota yang komplementer dengan Persatuan Indonesia.

Hingga kini DKI Jakarta masih didera oleh persoalan sampah. Akar persoalan sampah ibu kota adalah semakin meningkatnya volume sampah yang dibuang ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di luar DKI Jakarta seperti Bantargebang, Bekasi. Akar persoalan di atas membutuhkan solusi teknologi dan membangun budaya warga ibu kota terkait sampah. Solusi teknologi adalah berupa infrastruktur pengelola sampah ibu kota yang modern. Dengan infrastruktur tersebut diharapkan volume sampah yang dibuang ke luar Jakarta bisa berkurang secara signifikan.

Meskipun infrastruktur pengelola sampah ibu kota yang dikenal dengan sebutan *Intermediate Treatment Facility* (ITF) telah beroperasi. Namun tetap saja belum memadai. DKI akan terus tergantung kepada daerah tetangganya terkait dengan pembuangan sampah.

Hal itu terlihat bahwa hingga kini volume sampah yang dibuang ke TPST makin meningkat. Volume sampah yang diangkut ke TPST rata-rata mencapai 6.600 ton perhari. (\*)

